

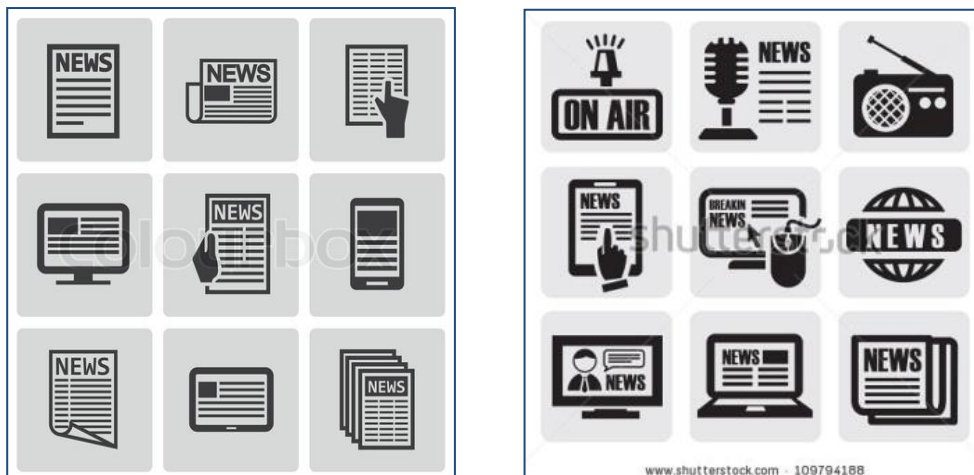


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Sarana & Prasarana

Kamis, 7 Juni 2018



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2018**

Daftar Isi

1. PROYEK DIJAMIN TAK MANGKRAK (*Media Online Kompas*)
2. KA CEPAT DONGKRAK EKONOMI MASYARAKAT (*Media Online Media Indonesia*)

PROYEK DIJAMIN TAK MANGKRAC

KOMPAS

Kamis

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

7 Juni 2018

Proyek Dijamin Tak Mangkrak

Kontrak proyek tahun jamak ditutup kecuali pembangunan bendungan baru. Komisi V meminta pemerintah menyelesaikan target sesuai rencana pembangunan.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjamin proyek infrastruktur yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tidak ada yang mangkrak hingga 2019. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak menganggarkan proyek tahun jamak pada pagu indikatif APBN 2019 kecuali pembangunan bendungan baru.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di sela rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (6/6/2018), menyatakan, pihaknya ingin memastikan tidak ada proyek yang mangkrak tahun depan. "Tidak boleh ada usulan baru kontrak *multiyears* (tahun jamak) karena selesai di 2019," ujarnya.

Kementerian PUPR mengusulkan anggaran Rp 102,01 triliun pada rancangan APBN 2019. Beberapa direktorat jenderal (ditjen) dengan usulan anggaran terbesar adalah Ditjen Bina Marga (Rp 39,26 triliun), Ditjen Sumber Daya Air (Rp 38,90 triliun), Ditjen Cipta Karya (Rp 13,43 triliun), dan Ditjen Penyediaan Perumahan (Rp 7,8 triliun).

Menurut Basuki, program dengan anggaran tahun jamak hanya dilakukan untuk proyek pembangunan bendungan baru. Tahun depan ada delapan ben-

dungan yang akan dibangun pemerintah. Dengan demikian, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk membangun 49 bendungan terpenuhi.

"Kalau bendungan masih boleh (kontrak tahun jamak) karena membangun bendungan tidak bisa dalam waktu setahun bisa selesai," ujar Basuki.

Terkait proyek-proyek infrastruktur, pemerintah telah menggelar evaluasi. Hasilnya, ada proyek yang targetnya tercapai, ada yang kemungkinan besar tidak tercapai. Target yang tidak tercapai di antaranya pengurangan angka kekurangan rumah (*backlog*). Meskipun demikian, program sejuta rumah dianggap berhasil.

Selesaikan target

Terkait program padat karya, Kementerian PUPR akan menambah jumlah lokasinya. Program padat karya irigasi kecil, misalnya, akan ditambah dari 5.000 lokasi pada tahun ini menjadi 8.000 lokasi pada tahun depan. Dengan rata-rata kebutuhan anggaran Rp 225 juta per lokasi, perlu Rp 225 juta, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 1,8 triliun.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menambahkan, pi-

haknya mendapat tugas yang mendesak, yakni mengganti jembatan-jembatan tua untuk memastikan pengendara dan pengguna aman. "Ada alokasi Rp 3,8 triliun untuk membangun jembatan baru, tetapi lebih banyak untuk perbaikan jembatan-jembatan yang ada," kata Arie.

Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis berpendapat, ada beberapa catatan terkait proyek infrastruktur pemerintah yang jadi perhatian. Pihaknya minta pemerintah menyelesaikan target sesuai RPJMN 2015-2019. "Beberapa masih di bawah target, bahkan jauh, seperti perumahan untuk rumah susun yang masih di bawah 40 persen. Demikian juga pembangunan jaringan irigasi di daerah masih di bawah 20 persen," kata Fary.

Terkait hal itu, Fary menyarankan beberapa ditjen yang targetnya belum tercapai, tetapi anggarannya justru dipotong, seperti di Ditjen Penyediaan Perumahan. Demikian pula dengan program pembangunan rel kereta api di Kementerian Perhubungan yang baru 30 persen dari target 3.000 kilometer. Komisi V minta proyek tahun jamak yang tidak terkait RPJMN 2015-2019 ditiadakan. Sementara program yang pencapaiannya masih rendah diharapkan tetap diupayakan. (NAD)

Pemerintah menjamin proyek infrastruktur yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tidak ada yang mangkrak hingga 2019. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak menganggarkan proyek tahun jamak pada pagu indikatif APBN 2019 kecuali pembangunan bendungan baru dan Kementerian PUPR mengusulkan anggaran Rp 102,01 triliun pada rancangan APBN 2019 dengan usulan anggaran adalah (Rp 39,26 triliun), (Rp 38,90 triliun), (Rp 13,43 triliun), dan (Rp 7,8 triliun). Sehingga, program dengan anggaran tahun jamak hanya dilakukan untuk proyek pembangunan bendungan baru. Tahun depan ada delapan bendungan yang akan dibangun pemerintah. Dengan demikian, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk membangun 49 bendungan terpenuhi.

Hashtag Berita :

#MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia #Bendungan #Infrastruktur
#RPJMN #KementerianPUDanPerumahanRakyat #PelaksanaanProyekNasional #APBN
#KementerianPPN/Bappenas #APBD #Investor

Kamis, 7 Juni 2018

KA Cepat Dongkrak Ekonomi Masyarakat

SELAIN memudahkan mobilitas warga dan konektivitas antarwilayah, pembangunan infrastruktur seperti sarana transportasi akan mendorong perekonomian masyarakat.

Pendapat tersebut disampaikan pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung, Ofyar Tamin. Dia mencontohkan proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta yang dinilainya akan meningkatkan perekonomian karena bisnis kian bergerak seiring dengan kecepatan mobilisasi masyarakat dari dua kota tersebut.

"Perekonomian akan meningkat karena ada interaksi yang semakin cepat, dari biasanya bisa sampai 6 jam di jalan menjadi kurang dari

1 jam," kata Ofyar, seperti dikutip dari *Antara*, kemarin.

Transportasi cepat itu, kata dia, tentu akan meningkatkan aktivitas masyarakat Jakarta-Bandung yang biasanya sehari sekali nanti bisa lebih dari dua kali karena mudahnya akses transportasi.

Kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki potensi daya tampung penumpang hingga 29 ribu orang per hari. Menurut dia, transportasi kereta cepat itu tentu tidak hanya menguntungkan kalangan menengah ke atas, tetapi akan memberikan dampak juga bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah, terutama yang berdomisili di sekitar stasiun.

Berkaitan dengan masalah

transportasi, Perum DAMRI yang bergerak di bidang layanan angkutan darat menjadi moda pertama yang langsung terintegrasi dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka. Perusahaan 'pelat merah' itu akan melayani penumpang dari Bandung, Cirebon, Kuningan, dan Cikarang yang langsung terhubung ke Kertajati, begitu juga sebaliknya.

"Bandara itu sebenarnya tidak seharusnya menjadi titik kemacetan, tapi solusi kemacetan agar bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang saat ini sudah terlalu tinggi. Makanya kami hadir di sini" kata Dirut Perum DAMRI Setia N Milatia Moemin. (E-2)

Pelaksanaan memudahkan mobilitas warga dan konektivitas antarwilayah, pembangunan infrastruktur seperti sarana transportasi akan mendorong perekonomian masyarakat. Kemudian proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta yang dinilainya akan meningkatkan perekonomian karena bisnis kian bergerak seiring dengan kecepatan mobilisasi masyarakat dari dua kota tersebut. Perekonomian akan meningkat karena ada interaksi yang semakin cepat

Hashtag Berita :

#PerhubunganDarat #MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia #Bendungan
#Infrastruktur #APBN #APBD #Investor #KeretaApi #RPJMN #PelaksanaanProyekNasional
#KementerianPUDanPerumahanRakyat